

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini pada intinya menyajikan tinjauan ulang literatur terkait dengan beberapa kajian/landasan teoritis, studi empiris terkait sebelumnya atau yang relevan dengan masalah pokok.

2.1. Beberapa kajian/landasan teoritis

2.1.1 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Inflasi juga diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus, dalam waktu dan tempat tertentu (Korteweg, 1973; Ackley, 1978; Nopirin, 1997; serta Boediono, 2001 dalam Setiawan, 2005). Keberadaannya sering diartikan sebagai salah satu masalah utama dalam perekonomian negara, selain pengangguran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Namun demikian, meskipun menjadi salah satu masalah besar dalam perekonomian, sebagian ahli sepakat bahwa dampak positif inflasi akan maksimal dengan tingkat inflasi yang agak rendah, berkisar antara 5% - 6% per tahun (Glassburner dan Chandra, 1981). Dengan kata lain, tingkat inflasi yang kurang atau lebih dari angka tersebut, akan memiliki kecenderungan memberi dampak negatif bagi perekonomian. Timbulnya inflasi dapat dikarenakan oleh beberapa hal. Menurut Soediyono (2000), dari sebab-musababnya inflasi dapat timbul karena adanya peningkatan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*), karena desakan naiknya biaya produksi (*cost push inflation*), serta karena keduanya (*mixed inflation*).

Dengan pendapat yang sedikit berbeda, Nopirin (1997) berpendapat bahwa karena inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum, dimana harga umum ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat, maka inflasi dapat disebabkan oleh perubahan permintaan dan atau penawaran agregat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui dua variabel tersebut. Sementara itu, menurut Boediono (2001) inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain. dilihat dari asalnya, inflasi dapat timbul dari aktivitas ekonomi dalam negeri (*domestic inflation*) dan dapat pula karena pengaruh komoditi impor (*Imported Inflation*).

Adapun rumus untuk menghitung inflasi adalah:

1.
$$In = \frac{IHK_n + IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$
2.
$$In = \frac{Df_n + Df_{n-1}}{Df_{n-1}} \times 100\%$$

In adalah inflasi, IHK_n adalah harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100), IHK_{n-1} adalah indeks harga konsumen tahun berikutnya. Df_n adalah GNP atau PDB deflator tahun berikutnya. DF_{n-1} adalah GNP atau PDB deflator tahun awal (sebelumnya).

2.2. Jenis Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu, dan pengelompokan yang akan dipakai akan sangat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai.

2.2.1. Menurut Derajatnya

Berdasarkan derajatnya, inflasi dibagi menjadi empat yaitu (Putong 2002):

- 1) Inflasi ringan di bawah 10% (single digit)
- 2) Inflasi sedang 10% - 30%.
- 3) Inflasi tinggi 30% - 100%.
- 4) Hyperinflasi di atas 100%.

Laju inflasi tersebut bukanlah suatu standar yang secara mutlak dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian di suatu wilayah tertentu, sebab hal itu sangat bergantung pada berapa bagian dan golongan masyarakat manakah yang terkena imbas (yang menderita) dari inflasi yang sedang terjadi.

2.2.2. Menurut Penyebabnya

Demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan *aggregate demand* masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang (Putong, 2002). Akibatnya, akan menarik (*pull*) kurva permintaan agregat ke arah kanan atas, sehingga terjadi *excess demand*, yang merupakan *inflationary gap*. Dan dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga-harga barang biasanya akan selalu diikuti dengan peningkatan output (GNP riil) dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi *full-employment*. Pengertian kenaikan *aggregate demand* seringkali ditafsirkan berbeda oleh para ahli ekonomi. Golongan *monetarist* menganggap *aggregate demand* mengalami kenaikan akibat dari ekspansi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan, menurut golongan Keynesian kenaikan *aggregate*

demand dapat disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi; investasi; *government expenditures*; atau *net export*, walaupun tidak terjadi ekspansi jumlah uang beredar.

Cost push inflation, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya *aggregate supply curve* ke arah kiri atas (putong, 2002). Faktor-faktor yang menyebabkan *aggregate supply curve* bergeser tersebut adalah meningkatnya harga faktor-faktor produksi (baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri) di pasar faktor produksi, sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditi di pasar komoditi. Dalam kasus *cost push inflation* kenaikan harga seringkali diikuti oleh kelesuan usaha.

2.2.3. Menurut Asalnya

Menurut asalnya inflasi dibagi menjadi dua, yaitu (putong 2002):

1) ***Domestic inflation***

Inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat.

2) ***Imported inflation***

Inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (*open economy system*). Inflasi ini dapat menular'baik

melalui harga barang- barang impor maupun harga barang-barang ekspor.

Terlepas dari pengelompokan-pengelompokan tersebut, pada kenyataannya inflasi yang terjadi di suatu negara sangat jarang (jika tidak boleh dikatakan tidak ada) yang disebabkan oleh satu macam/jenis inflasi, tetapi acapkali karena kombinasi dari beberapa jenis inflasi. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor - faktor ekonomi maupun pelaku-pelaku ekonomi yang benar - benar memiliki hubungan yang independen dalam suatu sistem perekonomian negara. Contoh : imported inflation seringkali diikuti oleh cost push inflation, domestic inflation diikuti dengan *demand pull inflation*, dsb.

2.2.4. Teori Inflasi Klasik

Teori ini berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang, serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari pertambahan barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut Klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit(Nanga. 2005). Pendapat Klasik tersebut lebih jauh dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = f(\text{jumlah uang beredar, kredit})$$

2.2.5. Teori Inflasi Keynes

Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat *full employment*. Menurut Keynes kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap

tingkat permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Jika uang beredar bertambah maka harga akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk transaksi, dengan demikian akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan mencegah pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi.

Analisa Keynes mengenai inflasi permintaan dirumuskan berdasarkan konsep *inflationary gap*. Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial (Nanga. 2005). Dengan demikian pemikiran Keynes tentang inflasi dapat dirumuskan menjadi :

$$\text{Inflasi} = f(\text{jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi})$$

2.2.6. Teori Struktural

Banyak study mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga, goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*, utang luar

negeri, dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural dalam perekonomian di negara berkembang, sering disebut dengan *structural bottlenecks* (Nanga, 2005). *Strucktural bottleneck* terutama terjadi dalam tiga hal, yaitu:

- 1) **Supply dari sektor pertanian (pangan) tidak elastis.** Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi *supply* dari sektor pertanian domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.
- 2) **Cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) akibat dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impor.** Keterbatasan cadangan valuta asing ini menyebabkan kemampuan untuk mengimpor barang-barang baik bahan baku; input antara; maupun barang modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri menjadi terbatas pula. Belum lagi ditambah dengan adanya *demonstration effect* yang dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibat dari lambatnya laju pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju pertumbuhan *supply* barang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.
- 3) **Pengeluaran pemerintah terbatas.** Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup untuk membiayai

pembangunan, akibatnya timbul defisit anggaran belanja, sehingga seringkali menyebabkan dibutuhkannya pinjaman dari luar negeri ataupun mungkin pada umumnya dibiayai dengan pencetakan uang (*printing of money*).

Dengan adanya *structural bottlenecks* ini, dapat memperparah inflasi di negara berkembang dalam jangka panjang, oleh karenanya fenomena inflasi di negara - negara yang sedang berkembang kadangkala menjadi suatu fenomena jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan kaum monetaris yang memandang inflasi sebagai fenomena moneter, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sektor moneter akibat dari ekspansi jumlah uang beredar, kaum *neo-structuralist* menekankan pada struktur sektor keuangan. Dasar pemikiran kaum *neo-structuralist* ini adalah pengaruh uang terhadap perekonomian terutama ditransmisikan dari *supply side* atau produksi. Menurut pemikiran kaum *neo-structuralist*, uang merupakan salah satu faktor penentu investasi dan produksi. Bila jumlah uang yang tersedia untuk investasi melimpah, menyebabkan harga uang (suku bunga) akan murah, maka volume investasi akan meningkat. Dengan meningkatnya volume investasi, volume produksi juga akan meningkat. Sehingga penawaran barang meningkat, yang pada gilirannya akan menekan tingkat inflasi. Dengan dasar pemikiran yang seperti ini, timbul pendapat bahwa deregulasi di sektor finansial dan peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi seraya menekan inflasi. Kaum strukturalis berpendapat, bahwa selain harga komoditi pangan, penyebab utama terjadinya inflasi di negara-negara berkembang adalah akibat

inflasi dari luar negeri (*imported inflation*). Hal ini disebabkan antara lain oleh harga barang - barang impor yang meningkat di daerah asalnya, atau terjadinya devaluasi atau depresiasi mata uang di negara pengimpor.

2.2.7. Teori Kuantitas Uang

Teori ini menyoroiti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti teori ini:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalo ada penambahan volume uang yang beredar baik dalam bentuk uang kartal atau uang giral.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan, yaitu: yang *pertama* adalah apabila masyarakat tidak mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Keadaan *kedua* apabila masyarakat mulai sadar bahwa ada inflasi. Keadaan *ketiga* terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi.

Hubungan di antara transaksi dan uang ditunjukkan dalam persamaan berikut, yang disebut persamaan kuantitas (*quantity equation*):

$$\text{Uang} \times \text{Perputaran} = \text{Harga} \times \text{Transaksi}$$

$$M \times V = P \times T$$

Sisi kanan dari persamaan kuantitas menyatakan transaksi. T menunjukkan total jumlahtransaksi selama periode waktu tertentu (setahun). Dengan kata lain, T adalah berapa kali dalam setahun barang dan jasadipertukarkan dengan uang. P adalah harga dar suatu transaksi tertentu. Produk dari harga barang transaksi dan

jumlah transaksi, adalah PT . Sisi kiri persamaan kuantitas menyatakan uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. M adalah kuantitas uang. V disebut perputaran uang transaksi (*transactions velocity of money*) dan mengukur tingkat di mana uang bersikulasi dalam perekonomian. Dengan kata lain, perputaran menyatakan beberapa kali uan berpindah tangan dalam periode waktu tertentu (Nanga. 2005).

2.3. Jumlah uang beredar

Pengertian jumlah uang beredar adalah penjumlahan dari uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat. Uang kartal ialah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang langsung di bawah kekuasaan masyarakat (umum) untuk menggunakannya. Uang kertas atau logam pemerintah (Bank Sentral) yang disimpan di dalam lemari besi bank-bank atau bank sentral sendiri tidak termasuk uang kartal. Sedangkan uang giral adalah seluruh nilai saldo ini merupakan bagian dari “uang beredar” karena sewaktu-waktu bisa digunakan oleh pemiliknya (masyarakat) untuk kebutuhannya persis seperti halnya uang kartal. Saldo rekening koran (giro) milik suatu bank pada bank lain bukan uang giral. Jumlah uang beredar meliputi mata uang ditangan publik dan deposito dibank-bank yang bisa digunakan rumah tangga untuk bertransaksi, seperti rekening koran(Sukirno,2004). Artinya, dengan M menyatakan jumlah uang beredar, C mata uang, dan D rekening (*demand deposit*), dapat di tulis:

Jumlah Uang Beredar = Mata Uang + Rekening Giro

$$M = C + D$$

Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah uang beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia jumlah uang beredar ini lebih banyak diterjemahkan dalam konsep *narrow money* (M1). Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan, bahwa uang kuasi hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan. Sejak tahun 1976 presentase uang kartal yang beredar (48,7%) lebih kecil dari pada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%). Sehingga, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Juga, mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya monetisasi dalam kegiatan perekonomian *subsistence*, akibatnya memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi(Sukirno,2004).

2.4. Pengertian Harga Premium Bersubsidi

Harga bahan bakar di Indonesia, salah satunya premium, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum penetapan harga bahan bakar di Indonesia antara lain: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga UUD 1945; Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2008; UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.34 tahun 2000; UU No.25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propenas) tahun 2000-2004; UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Pengertian subsidi secara umum adalah penetapan harga beli dibawah harga umum. Harga umum dalam hal ini dapat mengacu pada harga internasional atas komoditi yang sama maupun ongkos produksi. Dengan demikian subsidi premium dalam hal ini dapat berarti penetapan harga premium di bawah harga internasional atau ongkos produksi premium.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2002, harga premium bersubsidi serta harga bahan bakar lainnya telah beberapa kali berubah. Pada tahun 2005 diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri yang kemudian dirubah dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri. Setelah itu berturut-turut diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Nomor 41 tahun 2008; Nomor 16 tahun 2008; dan Nomor 38 tahun 2008 yang menetapkan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis minyak tanah (Kerosene), bensin premium dan minyak solar (Gas Oil) untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum (Prasetyo, 2003 dalam Adi, 2010).

2.5. Hubungan Jumlah Uang beredar dengan Inflasi

Pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi sering menjadi penyebab tingginya tingkat inflasi, naiknya jumlah uang beredar akan menaikkan permintaan agregat (*aggregate demand*) yang pada akhirnya jika tidak diikuti oleh pertumbuhan di sektor riil akan menyebabkan naiknya tingkat harga. Pemerintah

menggunakan instrumen tingkat suku bunga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Melalui kebijakan ini pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi (I), selanjutnya permintaan agregat (Z), dan akhirnya tingkat harga (P) serta GDP riil (Q). Sehingga dengan mengendalikan jumlah uang beredar maka inflasi dapat dikendalikan. (Atmaja, 1999).

2.6. Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak BBM terhadap Inflasi

Gejolak harga harga BBM akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan penerimaan pemerintah sebagai akibat adanya lonjakan keuntungan (*windfall profit*). Namun demikian, sebagai konsekuensi dari naiknya harga minyak, maka subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah juga semakin besar. Respon pemerintah terhadap perkembangan ini adalah dengan menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008 sebesar 27,8% (www.esdm.go.id).

Implikasi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah mengancam kelangsungan sektor produksi di dalam negeri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar minyak (BBM) terutama bagi sektor usaha kecil. Hal ini diperburuk oleh penetapan kebijakan acuan harga pasar bagi sektor industri tertentu. Dengan demikian, naiknya harga minyak dunia secara otomatis akan tercermin pada kenaikan harga BBM untuk industri dalam negeri. Bagi sektor produksi kenaikan harga BBM yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi barang dan jasanya. Semakin tipis margin keuntungan dan berkurangnya dana cadangan untuk mengurangi kerugian akan mendorong pembebanan biaya tersebut pada konsumen melalui kenaikan harga barang.

Seiring berjalannya waktu, harga komoditas terus meningkat mencapai titik puncaknya dan kemudian menjadi penurunan harga. Penurunan ini didorong oleh melemahnya permintaan akibat penurunan kinerja perekonomian yang telah mengalami resesi. Penurunan harga komoditas diawali oleh penurunan harga minyak yang kemudian berlanjut pada komoditas lainnya.

Kebijakan menaikkan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah pada bulan Mei 2008 sebesar 27,8%, sejak 1 Desember 2008 diturunkan menjadi Rp 5.500 dari Rp 6.000 dengan Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts-201/F00000/2008-S3 tanggal 28 November 2008 dan rencananya langkah ini akan disusul dengan penurunan harga Solar. Diharapkan penurunan harga ini akan mengurangi tekanan inflasi pada waktu yang akan datang. Mencermati perkembangan ini, implikasi pada perekonomian pasti akan terjadi. Kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan Inflasi daerah. Begitu pula sebaliknya untuk penurunan harga BBM (www.esdm.go.id).

2.7. Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Sebelumnya

Hamzah dan Sofilda (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *error corection model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang.

Hadi (2004) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dan Filipina. Periode pengamatan 1990-2001, dengan menggunakan pendekatan *error corection model*. Hasil studi tersebut adalah variabel JUB dalam jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Di Filipina dalam jangka pendek JUB mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap inflasi, tetapi dalam jangka panjang mempunyai hubungan negatif. Selanjutnya variabel pendapatan nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi baik di Indonesia maupun di Filipina.

Variabel kurs dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia maupun di Filipina. Sedangkan variabel tingkat suku bunga dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat Aji Yuda inflasi di Indonesia, di Filipina dalam jangka pendek berhubungan negatif tetapi dalam jangka panjang berhubungan positif dan signifikan terhadap inflasi.

Gregorius (2008) meneliti mengenai Pengaruh Peningkatan Jumlah Uang Beredar Dan Harga BBM Terhadap Inflasi Indonesia Periode Januari 2005 – Agustus 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari www.bi.go.id, www.bps.go.id, dan www.esdm.go.id dengan pengolahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* dengan periode Januari 2005 – Agustus 2008.

Hasil penelitian ini tingkat elastisitas pengaruh peningkatan harga jumlah uang beredar dan harga premium terhadap peningkatan indeks harga konsumen di Indonesia pada periode Januari 2005 – Agustus 2008.

Dalam menekan laju inflasi, maka harus dapat ditentukan kebijakan yang tepat untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang mantap. Untuk itu kebijakan moneter dan fisikal sangat diperlukan untuk mengendalikan harga supaya dapat menekan laju inflasi. Variabel-variabel moneter yang digunakan sebagai indikator adalah tingkat inflasi, jumlah uang beredar, serta BBM sebagai indikator makro.